

BAB II

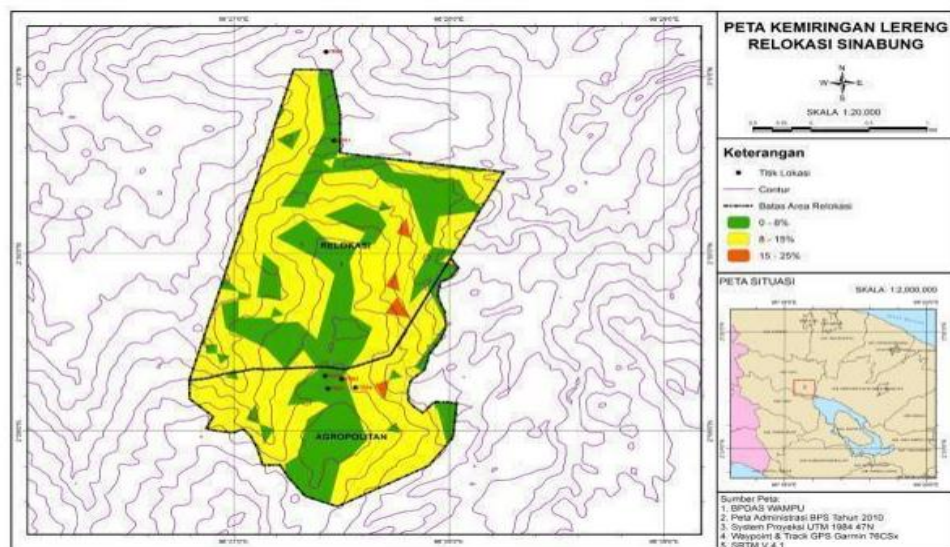
GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Siosar sebagai kawasan baru yang dibangun berasal dari kawasan hutan lindung yang kemudian diubah menjadi kawasan hunian tetap yang diperuntukkan kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung yang desanya tidak dapat ditempati lagi. Siosar dianggap unik karena dinilai sebagai kawasan yang diciptakan oleh manusia bukan sebagai kawasan yang sudah ada sebelumnya. Siosar dibuat atas rencana Presiden berdasarkan pada Keputusan Presiden (KEPPRES) No.21 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Percepatan Relokasi Korban Terdampak Bencana Erupsi Gunung Sinabung dengan bantuan pemerintah pusat dan instansi terkait lainnya untuk membuat kawasan hunian tetap ini. Lahan dan akses jalan yang digunakan pada kawasan hutan produksi tetap Siosar, dan hutan lindung sekitar 450 hektar.

Gambar 2.1: Peta Administrasi Siosar



Sumber: (Rauf & Wijoyo, 2015)

Kawasan relokasi Siosar masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 452,50 hektar (65,18%) dan Kawasan Agropolitan seluas 241,76 hektar (34,82%). Area ini berada di 3 kelas kemiringan yaitu datar hingga landau, bergelombang dan berbukit. Siosar dominan memiliki topografi bergelombang dengan kemiringan lereng 8-15% seluas 452,61 hektar (65,19%), sisanya berada pada topografi datar hingga landai seluas 236,01 hektar (33,99%), dan hanya sekitar 5,65 hektar saja yang berada pada topografi berbukit dengan kemiringan lereng 15-25% dalam (Rauf & Wijoyo, 2015)

Siosar berada di Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang terletak di 02°58 56.9 LU dan 98°30 18.5 BT dengan ketinggian rata-rata 280-1.420 meter di atas permukaan laut (BPS, 2018), dengan jarak sekitar 23,7 Km ke Gunung Sinabung, dan jarak ke Kabanjahe yaitu sekitar 17 Km. Secara geografis batas-batas wilayah Siosar ini yaitu:

Sebelah Utara : Desa Kacinambun

Sebelah Selatan : Kecamatan Merek

Sebelah Timur : Hutan Pinus

Sebelah Barat : Hutan Lindung.

Secara administratif dijelaskan bahwa Kawasan Siosar terdiri dari 3 desa yang direlokasi yaitu Desa Simacem, Desa Suka Meriah dan Desa Bekerah. Desa Bekerah menjadi desa yang posisinya berada paling depan dekat dengan gerbang masuk Kawasan Siosar, selanjutnya Desa Simacem yang berada di sebelah barat gerbang masuk dan Desa Suka Meriah berada di sebelah timur dari gerbang masuk.

Berikut daftar luas wilayah masing-masing desa di Siosar, Kecamatan Tigapanah:

Tabel 2.1: Wilayah Administrasi Kawasan Siosar

Nama Desa	Luas Wilayah
Desa Simacem	4,65 km ²
Desa Bekerah	3,82 km ²
Desa Suka Meriah	2,50 km ²
Total Wilayah	10,97 km ²

Sumber: Kantor Desa, 2022

Berdasarkan keterangan pada tabel 2.1, dijelaskan bahwa secara administratif Kawasan Relokasi Siosar mempunyai luas wilayah yang terbagi atas 3 desa dengan berbagai luas wilayah yang berbeda-beda. Desa Simacem sebagai desa yang memiliki wilayah terluas dengan luas 4,65km² sedangkan Desa Suka Meriah sebagai desa yang dengan wilayah tersempit di wilayah Siosar dengan luas 2,50km² dan Desa Bekerah memiliki wilayah dengan luas 3,82km². Luas daerah ini hanya sebagian dari luas wilayah Kecamatan Tigapanah, dimana luas wilayah ini diluar dari tiga desa yang sudah ada.

2.1.2 Kondisi Demografi

Kawasan Siosar merupakan kawasan yang diciptakan setelah meletusnya Gunung Sinabung beberapa tahun lalu yang dijadikan kawasan tempat tinggal bagi masyarakat korban erupsi Gunung Sinabung. Tahun 2013, ada beberapa desa yang terdampak paling parah dan kemudian direlokasi yakni Desa Suka Meriah, Desa Simacem, dan Desa Bekerah. Desa Suka Meriah memiliki luas wilayah sebesar 2,50 Km², Desa Simacem memiliki luas wilayah sebesar 4,65 Km² dan Desa Bekerah memiliki luas wilayah sebesar 3,82 Km². Hal ini menunjukkan bahwa Desa Suka

Meriah merupakan desa dengan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan desa lainnya. Dilihat dari kondisi demografi, Desa Suka Meriah memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dari antara kedua desa lainnya yakni 167 orang/ Km² karena Desa Suka Meriah memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak tetapi memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas.

Data penduduk desa-desa di Siosar belum terdaftar secara resmi pada BPS Karo. Hal ini menjadi salah satu yang membedakan desa-desa di Siosar dengan desa-desa lain secara administratif. Berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing desa yang ada di Siosar, jumlah keseluruhan penduduk yang menetap di Siosar adalah 1.271 jiwa dengan jumlah laki-laki dari ketiga desa tersebut yaitu 634 jiwa sedangkan jumlah keseluruhan perempuan yaitu 637 jiwa. Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Siosar sebagian besar merupakan Suku Karo, walaupun ada yang bukan bersuku Karo lainnya.

Desa Simacem sebagai desa paling luas ternyata memiliki jumlah penduduk yang paling banyak juga. Desa Simacem memiliki penduduk desa sebanyak 480 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 238 jiwa dan perempuan berjumlah 242 jiwa. Penduduk Desa Simacem rata-rata bekerja sebagai petani dengan jumlah 219 jiwa. Selain bekerja sebagai petani, masyarakat Desa Simacem juga ada yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 28 jiwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3 jiwa dan pekerja lainnya sebanyak 7 jiwa. Desa Simacem memiliki potensi wilayah yang berbeda dari desa lainnya dan sedikit unik, Simacem memiliki topografi tanah yang miring sehingga membentuk setiap baris rumahnya seperti tangga, dimana bagian atas rumah dibawahnya jalan, kemudian dibawahnya

dibangun rumah dan seterusnya yang kemudian rumah-rumah ini akan diwarnai secara berwarna-warni sebagai inovasi dari masyarakat untuk pariwisata Siosar.

Selanjutnya, Desa Bekerah dengan luas 3,82km² memiliki penduduk sebanyak 336 jiwa dengan perincian 169 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 167 jiwa berjenis kelamin sebagai perempuan. Desa Bekerah merupakan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan yang lainnya sehingga banyak diantaranya memilih menjadi petani yang berjumlah 109 jiwa, sisanya ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3 jiwa dan bekerja sebagai wiraswasta. Desa Bekerah sebagai desa yang memiliki wilayah paling luas kedua ternyata memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) yang paling banyak yaitu sejumlah 214 KK. Maka, secara tidak langsung Desa Bekerah merupakan desa yang paling banyak menerima lahan pertanian oleh setiap Kepala Keluarga di desa tersebut. Sebanyak 214 keluarga menerima lahan pertanian seluas 100 meter persegi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pertanian yang dimiliki oleh desa tersebut maka semakin banyak komoditi hasil pertanian yang dihasilkan.

Desa Suka Meriah merupakan desa yang memiliki luas wilayah paling kecil dengan luas 2,50km² namun memiliki jumlah penduduk yang hampir sama banyaknya dengan Desa Simacem yang berjumlah 455 jiwa. Penduduk Desa Suka Meriah terdiri dari 227 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 228 berjenis kelamin perempuan. Memiliki luas wilayah paling kecil, banyak masyarakat memilih bekerja sebagai petani yang berjumlah 263 jiwa, wiraswasta sebanyak 39 jiwa, dan 5 jiwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masyarakat yang bekerja sebagai petani sebanyak 263 jiwa, bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 39 orang, dan sebanyak 5 orang bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk di Siosar, Kecamatan Tigapanah

No	Desa/ Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Simacem	238	242	480	173
2	Bekerah	169	167	336	214
3	Suka Meriah	227	228	455	159
Jumlah		634	637	1271	546

Sumber: (Sitorus, 2020)

Tabel 2.3: Jenis Pekerjaan Penduduk Siosar

No	Nama Desa	Jenis Pekerjaan			
		Petani	Wiraswasta	Pegawai Negeri Sipil	Lainnya
1	Desa Simacem	219	28	3	7
2	Desa Bekerah	109	-	3	-
3	Desa Suka Meriah	263	39	5	-
Total		591	67	11	7

Sumber: (Sitorus, 2020)

Maka, bahwa mayoritas penduduk Siosar memiliki pekerjaan sebagai petani sejumlah 591 jiwa, wiraswasta sejumlah 67 jiwa dan Pegawai Negeri Sipil 11 orang dan pekerjaan lainnya 7 orang.

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi didefinisikan sebagai suatu kebiasaan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari dan sudah membudaya bagi mereka. Sumardi (2001) menyatakan kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, dimana pemberian posisis tersebut disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembawa status (Lausiry & Tumuka, 2019). Penelitian ini akan menjelaskan kondisi sosial dan kondisi ekonomi di Siosar.

a) Kondisi Sosial

Terkait dengan kondisi sosial Siosar dalam konteks ini akan memperjelas tentang interaksi sosial dan perubahan dalam lingkungan yang terjadi setelah dan sebelum dilakukannya relokasi pada masyarakat Siosar. Berbicara mengenai kehidupan sosial masyarakat Siosar, interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat tentu berbeda jauh ketika sebelum mereka direlokasi.

Saat proses relokasi belum dilakukan, situasi kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat di masing-masing desa ternyata lebih nyaman dikarenakan masyarakat lahir dan tumbuh pada daerah asalnya. Masyarakat desa tentu lebih memahami lingkungan desanya dan cara mereka untuk tetap bertahan hidup. Interaksi yang terjadi dan aktivitas yang dilakukan tentu lebih hangat dan memberikan makna tersendiri dikarenakan masyarakat sudah saling mengenal satu dengan lainnya. Selain itu, masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani dan beberapa diantaranya memiliki lahan pertanian sendiri yang luasnya berbeda-beda. Masing-masing desa juga tentu memiliki kebiasaan dan struktur budaya yang berbeda-beda, seperti pesta panen atau disebutkan kerja tahun pada bulan yang berbeda juga. Selain itu juga, kebiasaan yang ada yaitu biasanya anak-anak akan membantu orang tua ke ladang (bertani) sepulang mereka dari sekolah. Hal-hal seperti ini tentu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat semenjak direlokasi ke Siosar.

Perubahan-perubahan sosial tersebut memberikan dampak negatif dan positif dalam kehidupan sosial masyarakat. Setelah relokasi, masyarakat desa yang berasal dari kecamatan yang berbeda dan berjauhan, kemudian digabungkan menjadi satu pada wilayah yang sama dan berdekatan menyebabkan mereka harus kembali belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial masyarakat dari desa

lainnya. Selain itu, lahan pertanian yang diberikan oleh pemerintah merupakan lahan yang sebelumnya adalah hutan luas yang tanahnya belum subur sepenuhnya serta luas tanah yang diberikan oleh pemerintah sama luasnya kepada seluruh Kepala Keluarga di Siosar, sedangkan beberapa masyarakat memiliki tanah yang lebih luas ukurannya dikampung sebelumnya sehingga menimbulkan kecemburuan secara pribadi. Selanjutnya, Siosar yang dijadikan sebagai daerah tujuan wisata secara pelan-pelan membawa perubahan sosial masyarakat dan berdampak pada mata pencaharian masyarakat. Masyarakat yang berada di Kawasan Siosar secara perlahan harus mulai beradaptasi dengan pengunjung atau wisatawan yang datang ke Siosar. Dimana masyarakat Siosar dituntut untuk mampu mengembangkan kualitas diri sehingga pariwisata Siosar dapat diperlihatkan secara lebih lagi. Masyarakat yang tadinya penghasilan berkurang dari hasil bertani, pelan-pelan dapat berdagang. Adanya perubahan jenis mata pencaharian ini, menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dan berinovasi dalam bersosial.

Terakhir, perubahan kebiasaan ataupun budaya nyatanya tidak terlalu memberikan dampak pada masyarakat desa. Melalui adanya relokasi dan bersatunya desa-desa dari beberapa wilayah dan disatukan pada satu wilayah yang sama memberikan inovasi dalam menciptakan suatu budaya baru setelah mereka dipindahkan. Budaya yang dinamakan dengan dengan “Tarian Perik” atau diartikan Tarian Burung menggambarkan kisah perjuangan para korban erupsi Gunung terbang untuk berpindah dari Sinabung menuju Siosar untuk memulai kehidupan mereka yang baru.

Wilbert More menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan struktur sosial, pola-pola

perilaku, dan sistem struktur sosial, termasuk perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural (Lorentius, 2017:54).

Maka, disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan budaya, perilaku, dan norma ditengah-tengah masyarakat. Perubahan kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat Siosar sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Wilbert bahwa masyarakat Siosar mengalami perubahan struktur sosial, pola perilaku dan fenomena kultural secara umum yang terjadi di Siosar.

b) Kondisi Ekonomi

Mayoritas masyarakat desa pada Kawasan Siosar memiliki pekerjaan sebagai petani atau berladang (berkebun). Selain itu, masyarakat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Aron (buruh harian), dan menjadi pedagang. Setelah direlokasi, pemerintah menyediakan lahan pertanian bagi masyarakat setempat untuk digunakan bertani sehingga mampu membantu perekonomian masyarakat sekitar. Lahan tanah pertanian diberikan kepada setiap Kepala Keluarga seluas 100meter persegi yang diharapkan dapat dikelola dengan maksimal oleh masyarakat.

Namun, perubahan yang terjadi pada kondisi sosial secara tidak langsung berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat desa. Adanya perbedaan jenis lahan dan struktur tanah menyebabkan hasil pertanian tidak semaksimal pada saat di daerah sebelumnya (kampung), sehingga menyebabkan penurunan pada pendapatan masyarakat dari hasil bertani. Secara tidak langsung masyarakat dituntut untuk dapat berinovasi melalui pekerjaan lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dan bertahan hidup selain dari hasil pertanian yang menurun (Kaban et al., 2021:175).

Berubahnya Siosar sebagai daerah tujuan wisata ternyata menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk dapat bekerja pada sektor pariwisata Siosar. Masyarakat lokal berinovasi untuk membuka beberapa usaha seperti warung kecil, spot berphoto untuk wisatawan, dan menjadi pedagang yang menjualkan hasil panen dari lahan pertanian yang mereka miliki.

Selain itu, dengan dibukanya beberapa tempat wisata di Siosar memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk bekerja. Informan dalam penelitian ini, Rocky Tarigan juga menyatakan bahwa sudah memiliki alat untuk membuat kripik dan keterampilan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu berinovasi dan meningkatkan kualitas terbaik dalam diri mereka.

Maka, disimpulkan dengan adanya perubahan pada kondisi ekonomi masyarakat Siosar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan ini masyarakat memiliki kesadaran diri untuk dapat *survive* dan bertahan hidup.

2.2 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo

Secara umum ada beberapa hal yang akan dijelaskan mengenai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo pada subbab berikut ini, diantaranya yaitu definisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo serta lokasi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo. Selain itu akan dijelaskan mengenai Visi dan Misi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo serta struktur organisasi yang ada di dalamnya.

Secara garis besar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peranan untuk melakukan tugas pemerintah dengan mengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Secara spesifik peranannya dijelaskan yaitu memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata yang ada di daerah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh ahli, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo mencakup pendorong bagi masyarakat lokal agar senantiasa mendukung perkembangan pariwisata di wilayahnya (motivator), penyediaan fasilitas pendukung pariwisata (fasilitator), kerjasama yang sinergis dengan berbagai *stakeholder* pariwisata (dinamisator).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo berada di Jalan Gundaling Nomor 1 Berastagi, Kabupaten Karo Sumatera Utara Indonesia. Berastagi merupakan daerah otonom yang memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25. Adanya tugas dan wewenang serta kewajiban Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama yang disesuaikan dengan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan masyarakat dibutuhkan agar keseimbangan dalam pelaksanaan sesuai, serta tercapainya tujuan bersama.

Maka, selanjutnya dijelaskan mengenai visi dan misi, kedudukan, fungsi dan tugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, serta struktur yang ada di dalamnya, yaitu:

2.2.1 Visi dan Misi

Dalam menjalankan suatu organisasi tentu organisasi harus memiliki cita-cita dan impian yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan-tujuan organisasi dan hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Muslim, 2017:145), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo memiliki visi yaitu:

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS
PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU
MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”**

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo terdiri dari 3 makna yaitu maju, mandiri dan berdaya saing. Maju memiliki makna yaitu Kabupaten Karo memiliki masyarakat yang berkualitas, mengalami peningkatan dan pemerataan ekonomi serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Mandiri memiliki makna pemerintah berperan aktif dalam otonomi daerah dan memberikan stimulus kepada masyarakat untuk bertumpu pada kemampuan dan kekuatan dan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam, khususnya pada sektor pertanian dan pariwisata. Terakhir, berdaya saing bermakna Kabupaten Karo mampu untuk bersaing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dari semua sektor.

Dalam mencapai terwujudnya visi pembangunan daerah, maka tentu dibutuhkan misi yang harus dilakukan. Misi-misi tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4: Misi

No	Misi
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
4	Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
5	Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
6	Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
7	Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;
9	Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;
10	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
11	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan
12	Penggalian dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (PAD)

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Diharapkan melalui adanya visi dan misi dalam pembangunan Kabupaten Karo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo mampu melaksanakannya sehingga dapat mewujudkannya pengembangan pariwisata yang optimal.

2.2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

Dalam menjalankan organisasinya tentu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki tugas dan fungsinya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

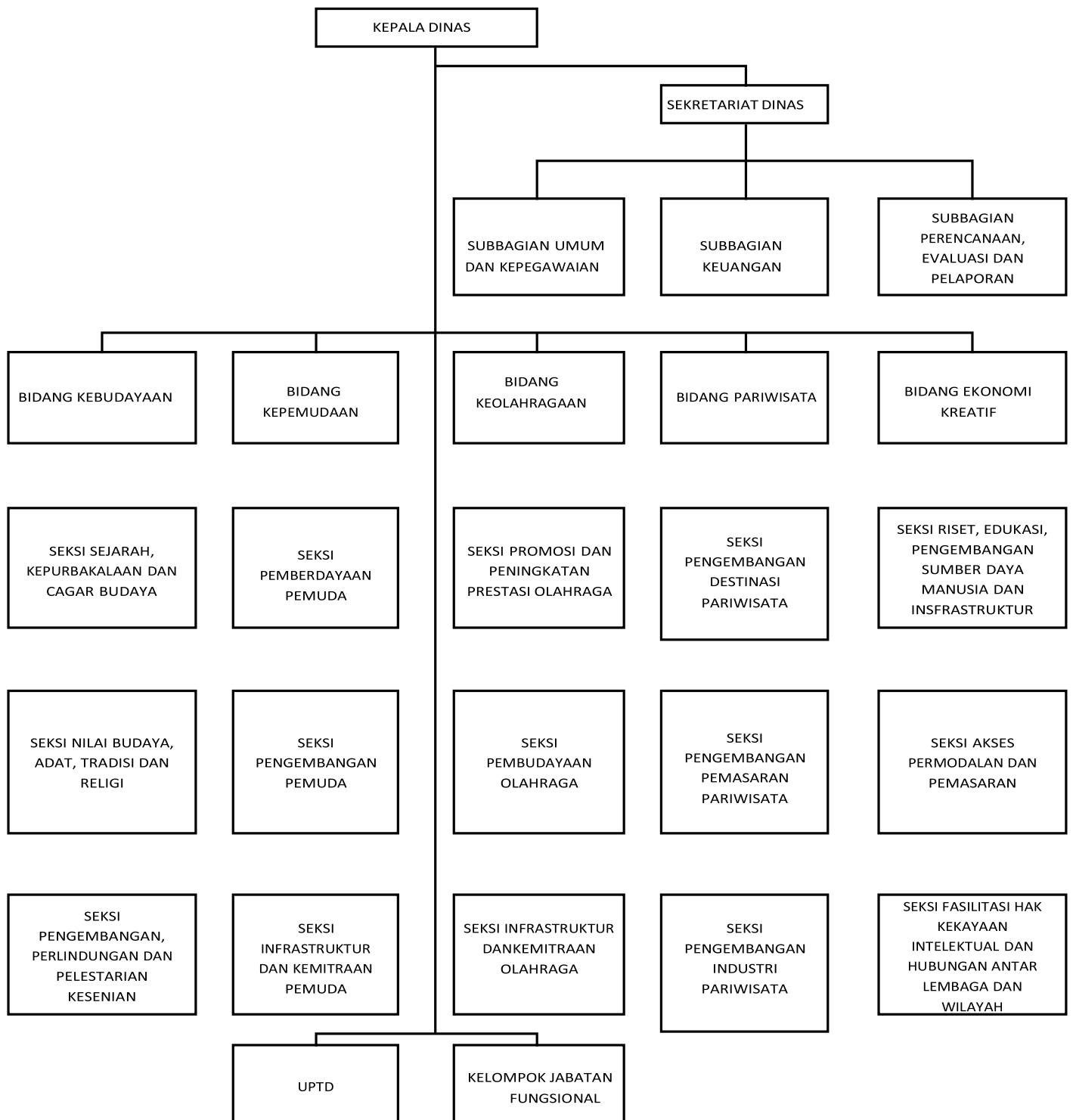
2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dibutuhkan dalam berjalannya operasional organisasi sehingga organisasi menjadi terarah dan melaksanakan peran serta tanggung jawab masing-masing. Dijelaskan bahwa struktur organisasi juga disebut sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo

dilihat pada bagan gambar dibawah ini:

Gambar 2.2: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, 2022

Dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo diisi oleh beberapa jabatan fungsional. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo dipimpin oleh Kepala Dinas yaitu Bapak Ir. Munarta Ginting, SP, dan dibantu oleh Sekretaris Dinas yaitu Ibu Eva Angela, S.SS, MM. Selanjutnya Sekretaris Dinas dibantu oleh Subbagian yang terdiri dari 3 yaitu Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Subbagian Perencanaan serta Evaluasi dan Pelaporan. Kemudian Dinas Pariwisata juga terdiri dari 5 bidang yaitu Bidang Kebudayaan, Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, Bidang Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif, selain itu bidang-bidang ini dibantu oleh seksi lainnya yang berjumlah 15 seksi. Terakhir, Kepala Dinas juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setempat dan kelompok jabatan fungsional lainnya.